

BAB II

TINJAUAN TEORI PERILAKU POLITIK DAN ETIKA POLITIK ISLAM

A. Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta antar lembaga pemerintah. Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik terdapat perilaku yang lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut permasalahan politik.²³

Perilaku politik merupakan bagian dasar pemikiran kaum behaviouralisme yang memandang bahwa kehidupan politik tidak terlepas dari perilaku-perilaku politik yang menyertainya. Penelitian yang didasarkan pada individu sebagai pusat perhatian, menekankan baik konsep peranan maupun konsep sosialisasi. Tiap individu mempunyai peranan yang berbeda, bila terdapat dalam konteks yang berbeda, hal ini dapat menjelaskan keragaman tingkah laku mereka. Jadi sikap, pemikiran dan perilaku pribadi harus dijelaskan dari segi peranan dari individu tersebut.²⁴

²³ Sudijono Sastro Atmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang Press, 1995), hlm 3

²⁴ SP Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 99-

. Kajian perilaku politik ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga unit dasar analisis, yaitu individu sebagai aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud dengan agregasi politik adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintah. Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin seperti pemimpin otoriter, pemimpin demokratis dan *leissfeir*.

Perilaku politik aktor politik seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dimensi latar belakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Demikian juga setiap warga negara dalam berperilaku politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang.

Faktor yang memengaruhi perilaku politik ada empat. Pertama lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. Kedua lingkungan sosial langsung itu memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik, serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup. Ketiga adalah struktur kehidupan yang tercermin dalam sikap individu yang meliputi basis pada kepentingan, basis penyesuaian diri dan basis sikap yang didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Keempat adalah Faktor sosial politik yang berupa situasi yang mempengaruhi aktor secara

langsung ketika akan melakukan kegiatan seperti cuaca, keadaan suasana kelompok, maupun keadaan keluarga serta ancaman dengan segala bentuknya.²⁵

B. Konsep Etika Politik

Secara mendasar, etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Dalam bahasa inggris, etika disebut sebagai *ethic* yang berarti *a system of moral principles of rules of behaviour*,²⁶ (suatu sistem, prinsip moral, atau aturan tentang berperilaku). Terkadang *ethics* (dengan tambahan huruf “s”) dapat berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles*, (cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral). Jika dengan maksud *plural* (jamak), *ethics* berarti *moral principles that govern of influence a persin’s behaviour*, (prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi).²⁷

Ditilik dari sisi cabang falsafah, ia membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang pandangan moral. Sebagai cabang ilmu, ia membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. , Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum berlaku bagi setiap tindakan manusia.

²⁵ Sudijono Sastro Atmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang Press, 1995), hlm. 7-11

²⁶ Jonathan Crowther (Ed), *Oxford Advanced Learner’s Dictinart*, (London :Oxford University Press, 1995) hlm. 393

²⁷ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013), hlm. 37.

Dalam falsafah Barat dan Timur, seperti di Cina dan dalam Islam, aliran-aliran pemikiran etika beraneka ragam. Namun demikian, pada prinsipnya falsafah tersebut membicarakan asas-asas tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai yangandung di dalamnya.

Sedangkan etika khusus terbagi lagi menjadi dua cabang yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nurani, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Sedangkan etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Sementara itu Etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individu semata, namun juga menyangkut etika sosial atau etika kolektif. Dalam etika individu, orang yang mempunyai pandangan tertentu dapat mewujudkannya dalam sebuah tindakan. Dalam etika politik kolektif, etika ini digunakan untuk mewujudkan pandangan yang dibutuhkan persetujuan dari banyak warga negara karena menyangkut kebijakan politik. Hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan kebijakan politik membutuhkan suatu perantara. Perantara ini berfungsi sebagai penghubung antara kedua hal tersebut, berupa simbol atau nilai seperti agama, demokrasi dan keadilan. Melalui simbol

dan nilai tersebut seseorang dapat menyakinkan warga negara agar menerima pandangan serta apa yang ingin ditunjukkan oleh seseorang tersebut.

Pembahasan filsafat teoritis ini tercakup dalam apa itu manusia, alam, hakikat realitas, apa itu pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang membahas tentang perilaku praktis manusia adalah etika itu sendiri. Jadi etika politik membahas tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara terhadap negara dan hukum yang berlaku. Etika berfungsi sebagai metode penyelidikan tentang nilai dan tingkah laku manusia.

Fungsi etika politik terbatas sebagai alat teoritis untuk menguji dan mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Maka, harus dinilai dengan penilaian secara obyektif. Tidak mencampur adukan prasangka, dan apriori, namun tetap menggunakan metode ilmiah, secara rasional dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis, akan tetapi tugas etika politik itu sendiri membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Yang artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh yang mengerti permasalahan. Serta memberikan dasar orientasi dan pedoman normatif bagi para elit politik yang ingin menilai kualitas dan tatanan politik yang lebih baik²⁸. Karenanya, inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan : dengan hak moral apa seseorang atau kelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki. Setiap

²⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 12

penguasa selalu dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya. Dan apabila pertanggung jawaban itu tidak diberikan, maka kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah.²⁹

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politikus, tetapi juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Karena, perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Sebuah kehendak yang baik, perlu didukung institusi yang adil. Dan kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab.

Atau dengan kata lain, etika politik mengandung aspek individu dan aspek sosial. Satu sisi, etika politik adalah etika individu dan etika social sekaligus. Disebut etika individu, karena ia membahas masalah kualitas moral pelaku, dan disebut etika sosial, karena ia merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di sisi lain, etika politik adalah etika institusional dan etika keutamaan sekaligus. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas dari luar diri pelaku.³⁰

²⁹ Haryatmoko, 2004, *Etika Politik dan Kekerasan*, Kompas, Jakarta, cet. II, hlm. 25

³⁰ *Ibid* hlm. 27

Selain itu, etika politik ini memiliki tiga dimensi : pertama adalah tujuan politik; ke dua berhubungan dengan masalah pilihan sarana; ke tiga berhadapan dengan aksi politik, yang terkait langsung dengan perilaku politikus. Dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Atau dengan kata lain, tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Dan kendala utama dalam masalah ini adalah upaya penerapan kebijakan umum (policy) dalam manajemen publik. Berdasarkan kebijakan umum ini, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat dapat membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kejelasan tujuan yang tertuang dalam kebijakan publik tersebut, menunjukkan ketajaman visi sang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Dan dimensi moralnya adalah terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas terhadap kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial, yang ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Pola-pola tersebut mengandung imperatif normatif yang disertai sangsi. Dimensi sarana (polity) ini, mengandung dua pola normatif. Pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan

pluratis; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Karena itu, asas kesamaan dan masalah siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu, relevan untuk dibahas. Ke dua, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal balik. Dimensi moral pada tingkat sarana ini, terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi dan praktik-praktik politik.

Sebagaimana etika sebagai bagian dari filsafat, etika politik mempelajari realitas, misalnya sistem moral namun tidak dapat menjadi sistem moral itu sendiri. Perlu digaris bawahi bahwasanya etika politik membantu menjejentahkan sistem moral atau ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik. Misalnya, bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban dasar-dasar etik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Etika politik ketika ditempatkan di dalam kerangka filsafat dengan permasalahannya merupakan legitimasi dalam arti etis. Dimana di dalam arti etis mengandung dua lembaga dimensi politis manusia. Pertama, bukan sebagai lembaga normatif penataan masyarakat, dan kedua, kekuasaan politis atau negara sebagai lembaga penataan masyarakat yang efektif, dalam arti mengambil tindakan.³¹

Didalam etika terhadap Madzhab-madzhab yaitu sebagai berikut :

³¹ *Ibid* hlm. 23

1. Deontologisme

Deontologisme memandang bahwa baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan.³²

Bentuk deontologisme ada dua yaitu :

a. Deontologisme tindakan

Yaitu baik dan buruknya suatu tindakan dapat dirumuskan dalam dan untuk situasi tertentu dan sama sekali tidak ada peraturan umum.

b. Deontologisme peraturan

Menurut paham ini, kaidah yang berlaku adalah baik dan buruknya suatu tindakan diukur dari peraturan yang berlaku umum, dan bersifat mutlak, dan tidak dilihat dari baik buruknya akibat perbuatan itu.

2. Egoisme

Egoisme memandang bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah yang memberi hasil atau bermanfaat bagi diri sendiri.³³

3. Theologis

³² M. Nur, Buku Ajar “Filsafat Ilmu” . (Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum, TT), hlm. 47

³³ *Ibid* hlm. 50

Memandang bahwa baik buruknya suatu hal adalah tujuan atau hasil.³⁴ Bukan pada proses yang dilaksanakan atau manfaat yang akan diperoleh ketika sebuah tindakan yang dilakukan.

4. Utilitarianisme

Madzhab Memandang bahwa baik buruknya tindakan seseorang diukur dari akibat yang ditimbulkan. Ada dua bentuk utilitarianisme, yaitu :

a. Utilitarianisme tindakan

Menunjukkan bahwa segala tindakan manusia akan mengakibatkan lkelebihan akibat baik sebesar mungkin. Semua cara harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tindakan tersebut.

b. Utilitarianisme peraturan

Tindakan yang sesuai kaidah-kaidah yang penetapannya menghasilkan kelebihan dari akibat-akibat baik sebesar mungkin dibanding akibat buruk

5. Idealisme

Idealisme berpandangan bahwa tindakan atau perbuatan paling baik adalah yang memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama.

Dalam aliran ini mempunyai ukuran untuk menilai asas-asas moral, nilai atau aturan untuk bertindak. Dalam melakukan tindakan aliran ini mengutamakan hak-hak yang bersifat spiritual atau mental daripada

³⁴ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. Etika Politik Islam, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013), hlm 52

berfifat inderawi atau kebendaan. Aliran ini mengutamakan kebebasan moral daripada kejiwaan alami. Lebih mengutamakan hal khusus daripada yang umum.³⁵

C. Etika Politik Islam Al Ghazali

Diskursus tentang etika berkaitan erat dengan pembahasan tentang akhlak. Prinsip-prinsip dan kaidah ilmu akhlak islam, semuanya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-sunah yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, akhlak tersebut merupakan suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individual maupun sosial dalam berinteraksi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau tingkah laku. Kata akhlak berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan tabiat, perangai kebiasaan, serta agama. Secara etimologi, kata akhlak merupakan jamak dari khuluq. Sedangkan *khuluq* berakar sama dengan *khaliq*, dan makhluk termasuk manusia. Dengan demikian akhlak berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Baik hubungan dengan kaitannya niat, tujuan perbuatan maupun dengan nilai nilai norma yang menjadi acuan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu baik ataupun buruk.

³⁵ Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, "*Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*" cet-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010), hlm 41.

Kata akhlak sendiri secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an, akan tetapi terdapat kata bentuk tunggal dari akhlak yaitu *khuluq*, seperti tercantum dalam salah satu ayat Al-Qur'an :

وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ³⁶

Kata akhlak banyak pula ditemukan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadits berikut :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Aku hanya diutus untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia”. (H.R. Malik)

Berbicara persoalan etika politik merupakan sesuatu yang penting dalam Islam, karena berbagai alasan. Pertama, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Sebagai contoh, di dalam menjalankan amanat berpolitik haruslah diniatkan kepada Allah. Dalam berpraktek politik, tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran dalam terhadap prinsip-prinsip ibadah dapat merusak “kesucian” politik itu sendiri.

Alasan yang kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam islam, karena politik tersebut berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Politik Islam sangat mengedepankan, karena etika merupakan bagian

³⁶ QS. Al-Qalam (68) :4

dari utama dari agama islam dan implementasi daripada filsafat moral yang merupakan ilmu pengetahuan nomatif tentang perbuatan manusia mengenai baik dan buruk bagi manusia yang dapat dimengerti oleh akal murni untuk masyarakat. Dalam berpolitik sering dikaitkan dengan hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan kehendak pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang berlaku di dalam dunia politik.

Politik dibangun bukan dari yang ideal dan tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara seperti yang diajarkan oleh Machiavelli. Sementara Immanuel Kant menyebutkan bahwa ada dua watak yang terselip di setiap insan politik, yaitu watak merpati dan watak ular.

Pada satu sisi insan politik memiliki watak merpati yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, tetapi di sisi lain juga memiliki watak ular yang licik dan selalu berupaya untuk memangsa merpati. Jika watak ular yang lebih menonjol daripada watak merpati, inilah yang merusak pengertian politik itu sendiri yang menurut filosof Aristoteles bahwa politik itu sendiri bertujuan mulia. Untuk itulah pentingnya etika politik sebagai alternatif untuk mewujudkan perilaku politik yang santun.

Pemikiran Al-Ghazali dengan konteks pemikiran Islam, al-Ghazali yang tidak memisahkan antara etika dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baik-buruk atau benar-

salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat. Maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral, bertanggung jawab, dan mengerti akan hak serta kewajibannya dalam hubungan kemasyarakatan secara keseluruhan. Unsur-unsur etika politik menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut :

a. Keadilan sebagai Tiang Etika Politik

Dalam memanager pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur atau dalam islam disebut sebagai *“baldataun thayyibatun wa rabbun ghafur”*. Dalam kitabnya Al-Ghazali menjelaskan bahwa adil tidak berbuat zalim terhadap rakyat. Adil merupakan bagian dari cabang keimanan (*furu’ Al-Iman*) yang diantara mereka pemimpin bisa dikatakan adil menurut Al-Ghazali apabila memenuhi persyaratan ini :

- a) Seorang pemimpin harus mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pemimpin, serta mengetahui bahaya dan kebinasaan apa yang akan didapatkan apabila menjalankan kepemimpinan dengan tidak adil. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يَظْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي

عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففأضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد
ورجلان تحاببا في الله ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال إلى نفسها قل إنني
أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شملها ما صنعت يمينه³⁷

- b) Mendekatkan diri dengan Ulama serta ada rasa rindu untuk selalu melihat dan berkumpul dengan Ulama, hal ini bisa dilakukan dengan duduk berbaur dengan rakyat di majelis-majelis mereka, sehingga mereka akan selalu mendengarkan nasehat-nasehat para Ulama. Menjauh dari Ulama yang jahat (ulamâ' sū'), yaitu Ulama yang rakus terhadap kehidupan dunia, mereka adalah Ulama yang tunduk kepada para pemimpin dan orang kaya supaya mendapatkan hadiah dan imbalan. Yang seharusnya adalah para pemimpinlah yang tunduk dan patuh kepada Ulama, karena Ulama adalah penerang bagi hati para pemimpin dan penunjuk bagi jalan yang benar.

- c) Mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, kata Al-Ghazali: "Janganlah seorang pemimpin sibuk dengan urusan ibadah (ibadah Sunnah), sedangkan rakyat menunggu didepan pintu rumah untuk meminta pertolongan darinya, karena mengabulkan hajat orang muslim lebih utama dari beribadah Sunnah". Sebagaimana hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَخِيْمَةَ أَخْبَرَ هُ أَن أَبَا مَرْيَمَ الْإِزْدِي أَخْبَرَ هُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَعْوِيَةَ

³⁷ Ali Ahmad, *Kitab shahih Al Bukhari dan Muslim*, (Depok: Alita Aksara Media, 2012) hlm. 73

فقال ما أنعمنا بك أبا فلان وهي كلمة تقو لها العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولّاه الله عزّ وجلّ شيئا من أمر المسلمين فا حتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم هم احتجب الله عنه دون حاجته وخلّته وفقره قال فجعل رجلا على حوا نج الناس³⁸.

b. Amanah sebagai tiang etika politik

Imam Al-Ghazali memandang amanah sebagai etika politik, bukan sebagai prinsip politik. Sebab itu dia memandangnya sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah, mulai dari yang rendah sampai kepala negaranya, supaya berlaku jujur dan amanah di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Imam Al-Ghazali mengecam para penguasa dan pejabat pemerintah yang tidak jujur dan tidak amanah, dan memberi nasehat kepada seluruh rakyat agar tidak tunduk dan patuh terhadap penguasa yang tidak amanah.³⁹ Segala tindakan yang mencerminkan tidak amanahnya para penguasa pada masa Al-Ghazali seperti korupsi, suap, dan pemerasan diungkapkannya dengan perkataannya; "...sesungguhnya keadaan keuangan pemerintah di zaman kita ini seluruhnya

³⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At Tirmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2001) hlm. 3

³⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta:Bulan Bintang,1975) hlm. 202

berasal dari harta yang haram. betapa tidak demikian, karena para penguasa merampas harta rakyat dengan zalim, seperti korupsi, pungutan liar, dan suap.

Seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 4 (58) sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁴⁰

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab pada prinsipnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang dipimpinnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Sebab apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah.

Jika dikaitkan dalam konsep agama Islam, dapat dipahami bahwa etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad Saw baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.

⁴⁰ Qs. An- Nisa : 4 (58)

Sebenarnya, etika politik dalam perspektif Islam merupakan asas yang kuat dalam usaha mewujudkan insan yang seimbang dalam segi rohani dan jasmaninya. Islam senantiasa menganjurkan kepada manusia untuk bersikap toleransi, berbaik sangka, serta bersikap saling tolong menolong. Hal ini sebagai karakter khusus bahwa etika Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Etika islam menganjurkan nilai-nilai murni untuk memartabatkan kehidupan manusia yang sesuai dengan fitrahnya..

Kecuali itu, keberadaan masyarakat dan negara merupakan hal yang sangat penting dan mutlak dalam Islam. Karena itu, beberapa ahli fikih politik Islam mengemukakan adalah suatu kewajiban bagi orang Islam untuk mendirikan negara. Dengan adanya negara bisa diciptakan sebuah keteraturan kehidupan bermasyarakat yang baik, sehingga pada gilirannya umat Islam bisa menyelenggarakan ibadahnya dengan baik pula. Bila hubungan antar masyarakat dan penyelenggara negara tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka yang akan muncul adalah kekacauan dan muncul anarki yang sangat dikecam oleh para masyarakat. Kekacauan dan anarki dalam suatu masyarakat tersebut dapat mengganggu penyelenggaraan negara.⁴¹

Etika kampanye dalam politik, menuntut adanya perilaku lurus yang dilakukan oleh para aktor politik. Hal itu diwujudkan agar antara perbuatan dengan realitas bisa terwujud secara efektif dalam tatanan politis. Para aktor

⁴¹ Hakikat Politik Substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku serta budaya politik yang berorientasi pada nilai keislaman. Lihat : Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.1996) hlm.36

politik juga seharusnya bisa menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Demikian juga dengan keputusan yang diambilnya, untuk apa dan untuk siapa keputusan-keputusan itu meski dilakukan. Pastilah dengan adanya kesadaran-kesadaran tersebut, kampanye akan mendapatkan optimalisasinya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya upaya realisasi kaitan antara perilaku dengan prinsip etika politik islam sebagai acuan moralitas.⁴²

Kalau politik itu siyasah artinya memelihara urusan ummat, maka pelaku politik hendaknya harus berani merubah paradigma politiknya, bahwa tujuan berpolitik adalah mengatur, mengurus dan memelihara urusan ummat, yang semuanya bermuara pada satu titik yaitu mencari ridha Allah (*libtighai mardhatillah*). Bukan sebaliknya, untuk semata-mata mencari jabatan, uang dan kekuasaan.

Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menghaluskan kekuatan dan kekuasaan politik dan mengatur kepentingan - kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara saat ini khususnya antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip peradilan bebas, pengakuan dan

⁴² Hasan, Muhammad Thalhan , *Prospek Islam dalam Menghadapi tantangan zaman*, (Jakarta: Lantabora Press ,2000) hlm.41

perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesejahteraan, prinsip perdamaian dan keselamatan serta prinsip ketaatan.⁴³

Maka dari itu, etika politik dalam kaitannya dengan kampanye politik: merupakan bagaimana cara para aktor politik melakukan gerakan-gerakan serempak berdasarkan nilai-nilai yang dimanifestasikan dalam perbuatan sehari-hari, sehingga mampu untuk melakukan terobosan seta perubahan yang pada akhirnya akan menarik simpatisan dari khalayak masyarakat. Adanya kumpulan-kumpulan kebenaran dan petunjuk yang diterapkan dalam tingkah laku sehari-hari sehingga dalam hal ini, para aktor mampu untuk mencerminkan jiwa kepemimpinannya terhadap kebaikan yang dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan.⁴⁴

D. Etika politik menurut Frans Magniz Suseno

Dalam pemikirannya tentang etika Franz Magniz Suseno mengungkapkan bahwa etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan pelbagai ajaran moral. Etika merupakan refleksi sistematis berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika

⁴³ Irfan Idris, *Etika Politik Islam*, Koran fajar Jum'at 19 Juni 2009

⁴⁴ Kholiq, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah.2005) hlm. 19

diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya.

Etika tidak menghasilkan secara langsung tentang kebaikan pada seseorang, akan tetapi menghasilkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika tidak secara langsung membuat manusia menjadi baik, akan tetapi memberikan pengertian tentang berbuat baik. Tujuan dalam mempelajari etika adalah membuat mereka lebih kritis mengenai bidang moral. Etika membantu untuk mencari orientasi, agar hidup kita tidak latah atau ikut-ikutan terhadap berbagai pihak yang akan menetapkan bagaimana kita harus hidup, akan tetapi bagaimana kita harus hidup secara baik dan benar supaya kita mampu untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita.

Menurut Frans Magniz Suseno sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa etika sangat diperlukan pada zaman sekarang ini yaitu :

- a. Kehidupan dalam masyarakat yang pluralistik, termasuk juga dalam moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari berbagai latar belakang sehingga dapat menimbulkan sekian banyak pandangan-pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa paham mereka yang paling benar.
- b. Manusia hidup di dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang modernisasi ini telah melanda sampai penjuru tanah air. Rasionalisme, individualisme,

materialisme, kepercayaan akan kemajuan serta sistem pendidikan modern secara hakiki mengubah budaya dan lingkungan di Indonesia.

- c. Proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. Jadi di sini, dengan etika dapat sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak mudah terpancing, tidak cepat memeluk segala pandangan yang baru.
- d. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa ragu dengan menutup diri dapat dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah

Franz Magnis Suseno secara politik mempunyai pandangan bahwa pemimpin menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan atau untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mempertahankan kekuasaan serta berpolitik itu harus menjunjung pada nilai moralitas berpolitik. Kekuasaan dipandang atau dilihat sebagai wadah untuk memenuhi dan menciptakan ketentraman, kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Kekuasaan tersebut harus memiliki legitimasi religius. Implikasi terpenting dari

legitimasi religiud adalah bahwa penguasa dalam menjalankan kekuasaanya berada di dalam penilaian moral.⁴⁵

Untuk menghadapi berbagai macam moralitas yang ada dalam masyarakat yang semakin pluralistik ini sangat diperlukan sebuah tolak ukur supaya hasil dari penilaian itu tidak bersifat subyektif. Franz Magnis Suseno dalam hal ini menyatakan bahwa dalam menilai tindakan manusia secara moral diperlukan tolak ukur paling akhir yaitu beberapa prinsip-prinsip dasar moral. Pada prinsip-prinsip dasar moral ini semua moral yang lebih konkrit harus diukur.⁴⁶ Adapun prinsip-prinsip moral dasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip sikap baik

Prinsip sikap baik ini mendasari semua norma moral, karena pada dasarnya manusia harus bersikap baik terhadap siapa saja, bersikap dalam arti memandang seseorang tidak hanya sejauh bagi dirinya sendiri. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan secara kongkrit tergantung dari apa yang baik dalam situasi kongkrit, prinsip sikap baik mempunyai arti yang besar bagi kehidupan manusia, karena mempunyai dasar dalam struktur psikis manusia. Apabila sikap dasar manusia itu negatif, maka sikap antar manusia saling mencurigai sehingga dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Prinsip sikap baik ini

⁴⁵ Franz Magins Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3.

⁴⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 129.

mendasari merupakan hal yang paling dasar dari semua norma karena hanya atas dasar prinsip tersebut manusia harus bersikap adil dan jujur terhadap apapun.⁴⁷

2. Prinsip Keadilan

Prinsip kebaikan hanya menegaskan agar manusia bersikap baik terhadap siapa saja . Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki tersebut terbatas. Hal itu dinyatakan Franz Magnis Suseno tidak hanya berlaku bagi benda materiil yang dibutuhkan manusia. Maka secara logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan itu harus dibagi. Prinsip seperti itulah yang disebut prinsip keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan mengandung kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pembagian dari pada yang baik dan yang buruk, dalam pemberian bantuan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kewajiban ini hanya mengizinkan perkecualian apabila perilaku yang tak sama dapat dibenarkan berdasarkan sikap baik atau karena dalam jangka akan menghasilkan kesamaan yang lebih besar. Intinya setiap perlakuan yang tidak sama menuntut pertanggungjawaban khusus.

3. Prinsip Hormat pada diri sendiri

Dalam prinsip ini Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa manusia wajib untuk memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.

⁴⁷ *Ibid*, hlm130.

Prinsip ini berdasarkan pada paham bahwa manusia dipandang sebagai individu yang mempunyai kehendak, yang dipandang secara individu, yang memiliki kebiasaan dan suara hati dan makhluk akhlak berakal budi. Manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Manusia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Maka nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan lebih jauh, melainkan manusia juga wajib memperlakukan dirinya dengan hormat, dan menghormati martabat dirinya .

BAB III

PERILAKU POLITIK YUNI SATIA RAHAYU DALAM PILKADA 2015

A. Profil Yuni Satia Rahayu

Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu M.Hum. adalah wakil bupati yang menjabat pada periode 2010-2015 yang mendampingi Drs. Sri Purnomo, M. S.I. Beliau lahir di Ngawi 28 Juni 1968. Sebelum menjadi wakil bupati sleman beliau adalah penggerak dan aktivis berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Diantaranya adalah Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (1989). Forum ini membela hak-hak perempuan edukasi dan pengorganisasian serta advokasi. Selain itu ia juga pernah membidangi dan memimpin beberapa lembaga swadaya masyarakat, antara lain; Rumpun Tjut Nyak Dien/RTND (1991-1995), Organization Woman Advancement (OWA/1996-1997) di Palembang, Women Crisis Center (WCC/1997-1999), Rumpun Gema Perempuan Jakarta (2000-2005). Sama seperti RTND, Rumpun Gema Perempuan juga berkonsentrasi pada sector pekerja rumah tangga (PRT). Di Lembaga ini, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari tahun 2000–2005.

Ia kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 1999 dan lebih intens menjadi pengurus PDI Perjuangan setelah ia kembali ke Yogyakarta. Sesuai latar belakang aktivitasnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPD PDI Perjuangan

DIY (2007 – 2010). Berikutnya, sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY (2010 – 2014) dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY.

Yuni Satia Rahayu menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga tamat Sekolah Menengah Atas di Sragen. Beliau mengawali pendidikan formalnya di SD Negeri XI Sragen Jawa Tengah lulus tahun 1981, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sragen, Jawa Tengah lulus tahun 1984. Pada tahun 1987 beliau lulus dari SMAN 1 Sragen. Kemudian beliau hijrah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan S1 nya Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UGM. Yogyakarta lulus pada tahun 1994. Ketertarikannya pada masalah perempuan membuat beliau mengambil S2 dalam konsentrasi Pusat Studi Kajian Wanita Fakultas Pasca Sarjana UI 2000-2003. Kemudian untuk menunjang pengetahuan tentang ilmu politik beliau melanjutkan studi S3 nya di Ilmu Politik, Fak. Sains dan Kemanusiaan, Universitas Kebangsaan Malaysia.

Sebagai Calon Bupati, poin utama yang menjadikan pusat perhatian beliau adalah memberdayakan pasar tradisional. Banyak alasan mengapa pasar tradisional harus diupayakan bisa dipertahankan keberadaannya. Salah satunya adalah peran strategis yang dimainkan oleh pasar tradisional dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional merupakan sandaran hidup banyak orang yang dalam kegiatan ekonomi berskala rakyat. Dengan kata lain, karena pasarlah yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pasar tradisional perlu dioptimalkan termasuk memberi

perlindungan terhadap perdagangan pasar tradisional dari permainan harga dan persaingan dengan pasar modern. Antara pasar tradisional dengan pasar modern bisa bersinergi.

Kepedulian Neny (sapaan akrab Yuni Satia Rahayu) terhadap pemberdayaan pasar tradisional ini tidak terlepas dari hobi Neny yang suka belanja di Pasar Tradisional. Bahkan, jika sedang belanja di pasar tradisional, Ia tak pernah lupa membeli makanan kesukaannya yaitu kacang rebus.

Poin utama kedua adalah pendidikan dasar terutama PAUD, misalnya perbaikan fasilitas PAUD yang ada.”Kedepannya saya ingin menggagas ide”kota layak anak”kaitannya dengan perkembangan pendidikan di Sleman,” ujarnya. Dengan “kota layak anak” maka banyak public space yang bisa memenuhi kebutuhan anak untuk bermain. Ia membayangkan masa kecilnya saat di Sragen yang bebas bermain di Alun-alun dan taman bermain anak. Ia mengaku prihatin banyak kota di Indonesia yang kurang memperhatikan tata ruang kotanya.

Poin ketiga, yang menjadi konsen Neny adalah upaya pengelolaan sumber daya air. Hal ini perlu ditekankan mengingat secara geografis Sleman merupakan daerah konvergensi air utama menghadapi climate change (perubahan iklim).

Berkaitan dengan Sleman ke depan, Neny akan berusaha menjadikan Sleman sebagai kabupaten Percontohan, yakni dengan meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam politik.

Dengan kata lain pembangunan memang harus benar-benar dilaksanakan secara bottom-up. Hal ini bisa dilakukan dengan senantiasa selalu berada ditengah-tengah masyarakat sehingga Neny mengetahui persis apa yang diinginkan masyarakat.⁴⁸

B. Gambaran Pilkada di Kabupaten Sleman

1. Polemik Pilkada Kabupaten Sleman 2015

Pemilihan kepala daerah secara serentak untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, salah satu yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Kabupaten Sleman. Meskipun dilaksanakan secara serentak namun terdapat perbedaan jumlah dan pasangan calon dan wakil kepala daerah pada masing-masing daerahnya. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Pasangan dengan nomor urut 1 adalah pasangan Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistiya, pasangan nomor 1 ini diusung oleh koalisi Partai PDIP, PKS dan Gerindra. Sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun yang diusung oleh koalisi partai PAN, NASDEM, PPP, Demokrat, dan Golkar.

Pada awal penetapan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Sleman, ternyata sudah membawa polemik dan membawa suasana yang cukup panas. Karena dari bakal calon Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun yang

⁴⁸ Yuni Satia Rahayu, https://id.wikipedia.org/wiki/Yuni_Satia_Rahayu

sebelumnya anggota legislatif DPRD Sleman F-PDIP belum bisa menyerahkan surat yang menyatakan berhentinya dari anggota legislatif. Ini terjadi karena untuk meminta surat tersebut harus ada surat rekomendasi dari PDIP selaku parpol pengusungnya, sementara PDIP sendiri mengusung Yuni Setia Rahayu sebagai calon Bupati Sleman.

Dengan lamanya surat ini tidak keluar, akhirnya hal ini memicu terjadinya aksi oleh pendukung santun (Sri Purnomo dan Sri Muslimatun) dimana terjadi penyegelan terhadap kantor DPRD Sleman agar surat segera ditindaklanjuti termasuk meminta ke gubernur DIY. Akhirnya KPU Sleman sendiri menetapkan keputusan jika surat ini tidak bisa keluar, maka jika memang Sri Muslimatun sendiri telah bertekad baik dan berusaha memenuhi persyaratan ini, maka akan bisa diloloskan, yang akhirnya pada tanggal 22 oktober di loloskan.

Secara aturan memang ini menjadi polemik dan menjadi keputusan kontroversi, karena tidak lengkapnya berkas yang menjadi syarat namun diloloskan. Tapi di sisi lain, karena surat rekomendasi Sri Muslimatun yang keluarnya dari partai seolah-olah partai ini menjadi kunci utama pelolosan, maka ini juga membuat polemik. Selain itu, alasan lain yang menjadi perhatian ialah tagline dari aksi pendukung santun terkait “jangan lukai demokrasi dengan pasangan tunggal”, dimana ketika bakal calon pasangan santun ini tidak lolos maka hanya ada satu pasangan tunggal.

Sebenarnya tidak menjadi masalah jika hanya ada pasangan tunggal, namun jika pasangan tunggal saja, maka masalah yang timbul akan lebih besar. Baik terkait massa pendukung, maupun stigma negatif terhadap partai-partai tertentu karena masalah surat tersebut, bahkan terkait KPU dan DPRD.⁴⁹

2. Debat Calon Bupati Kabupaten Sleman

Guna memantapkan wawasan dan menguji kesiapan para calon bupati dan wakil bupati Sleman, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman menyelenggarakan debat calon bupati dan calon wakil bupati yang mana hasil dari debat ini dapat dijadikan tolak ukur para masyarakat Sleman untuk melihat visi-misi maupun upaya yang dilakukan calon bupati untuk Kabupaten Sleman dimasa 5 tahun yang akan datang.

Dua calon bupati (cabup) Sleman yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 mendatang, Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu mendapat kesempatan bertemu di Joglo Winasis, Institute for Research and Empowerment (IRE) dalam acara diskusi bulanan bertema “Masa Depan Desa di Mata Calon Bupati Sleman”, Senin (31/8/2015). Di

⁴⁹ [http://serialinspirasi.blogspot.co.id/2015/11/analisis-kondisi-pilkada-sleman-2015-](http://serialinspirasi.blogspot.co.id/2015/11/analisis-kondisi-pilkada-sleman-2015-how.html)

[how.html](http://serialinspirasi.blogspot.co.id/2015/11/analisis-kondisi-pilkada-sleman-2015-how.html) diakses pada tanggal 10 Agustus 2016

kesempatan tersebut kedua cabup sempat bersilang pendapat dalam bidang pertanian dan anggaran untuk desa di Sleman.

Kedua cabup sama-sama sepakat bahwa Kabupaten Sleman identik dengan pertanian dan kekuatan desa dalam berbagai bidang seperti pengelolaan lahan, ekonomi, seni, serta kebudayaan. Walaupun begitu keduanya tetap memiliki visi dan misi yang berseberangan soal kedua hal tersebut.

Yuni Satia Rahayu, cabup yang diusung PDIP dan Gerindra berjanji akan mengadakan anggaran khusus desa Rp 1 – 2 miliar per desa setiap tahun dan Rp 50 juta untuk setiap pedukuhan di Sleman yang berjumlah 1,112 pedukuhan. Totalnya mencapai angka Rp 500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun sarana dan pra sarana untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Yuni juga memiliki rencana untuk membebaskan Nilai Jual Objek Pajak (NJPO) lahan pertanian di Sleman.

“Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Anggaran khusus desa yang akan kita ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita gunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu bidang pertanian juga menjadi prioritas kami dengan membebaskan NJPO supaya meringankan beban yang semakin berat di pundak para petani,” ujar Yuni.

Berbeda dengan Yuni, Sri Purnomo mengungkapkan bahwa anggaran khusus desa dan dusun yang direncanakan Yuni tersebut tidak realistis. Sri Purnomo menjelaskan bahwa anggaran khusus untuk desa yang dicanangkan Yuni tersebut jauh lebih besar daripada yang sudah ada di APBD 2015, yaitu Rp 300 miliar.

“Kalau saya lebih penting merencanakan program dengan hal-hal yang realistis. Tidak bijak bila kita menjanjikan hal yang sulit seperti anggaran khusus desa yang mencapai Rp 500 miliar. Saya takut bila hal tersebut dipaksakan akan memangkas anggaran untuk program lain dan mengganggu,” bantah Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga tidak setuju dengan rencana Yuni untuk membebaskan NJPO lahan pertanian di Sleman. “Kalau NJPO lahan pertanian dihapuskan maka nilai lahan tersebut juga akan turun. Semua sudah ada hitung-hitungannya. Kalau dari saya, para petani akan kita beri subsidi agar mereka tidak menanggung beban berat dari NJPO. Supaya Sleman tetap menjadi lumbung padi bagi Yogyakarta,” ungkapnya.⁵⁰

Adapun hasil perolehan suara dalam pemilukada di Kabupaten Sleman tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Perolehan Suara Per Kecamatan Pilkada 2015 Kab. Sleman

⁵⁰ <http://www.kpu-slemankab.go.id/kpu-slemankab-detail-artikel-berita-51.html>
diakses pada tanggal 24 Agustus 2016

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON		SUARA SAH
		1. YU-DA	2. SANTUN	
1.	Berbah	12.153	14.601	26.754
2.	Cangkringan	7.855	8.997	16.852
3.	Depok	25.637	25.668	51.502
4.	Gamping	18.553	27.741	43.294
5.	Godean	15.447	20.513	35.960
6.	Kalasan	15.425	22.776	38.204
7.	Minggir	7.953	10.915	18.148
8.	Mlati	19.138	23.589	42.727
9.	Moyudan	6.570	12.528	19.098
10.	Ngaglik	19.476	23.124	42.600
11.	Ngemplak	13.871	15.900	29.771
12.	Pakem	7.733	12.024	19.757
13.	Prambanan	10.301	16.458	26.759
14.	Seyegan	11.2222	15.854	27.076
15.	Sleman	14.668	21.632	36.300
16.	Tempel	12.912	16.822	20.364
17.	Turi	8.716	11.648	20.364
JUMLAH TOTAL		227.633	297.267	524.900
Sumber : https://pilkada2015.kpu.go.id/slemankab/				

C. Strategi Kampanye Pasangan Yuni Satia Rahayu - Danang Wicaksana Sulistiya

Strategi yang dimaksud yaitu tentang berbagai cara dan metodologi yang digunakan oleh kandidat legislator, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan kandidat, serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk oleh partai politik. Pilihan strategi yang tepat akan menjadi sangat penting, agar proses pemenangan bisa efektif dan efisien (secara politik dan ekonomi).

Disinilah penting bagi kandidat dan elemen pendukung mendesain dan menyusun rencana strategi pemenangan kontestasi pemilihan anggota legislatif. Pemilihan strategi tentu ditujukan untuk dua hal yaitu *pertama*, untuk mengetahui peluang prosentase kemenangan sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif dilaksanakan. *Kedua*, untuk mengetahui siapa sesungguhnya lawan politik yang kuat, dan *ketiga*, untuk mengetahui berapa resource finansial yang harus dipersiapkan.⁵¹

Adapun strategi yang digunakan pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 tersebut adalah :

1. Blusukan ke pasar tradisional

Sebagai upaya mendekatkan dirinya kepada masyarakat khususnya para pedagang, Yuni Satia Rahayu blusukan mengajak para pedagang

⁵¹ Peter schroder, *Strategi Politik (Politische Strategien) Edisi Revisi*, German : Friedrich-Naumann-Suftung fuer die Freiheit, 2008). hlm. 11

pasar tradisional Bibis, Sidokerto, Godean, Sleman untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada 9 Desember mendatang karena untuk mencapai lebih banyak pendukungnya, Senin (16/11). Sampai berita ini diturunkan Yuni dan Danang gencar melakukan kampanye. Kegiatan kunjungan Yuni satia Rahayu dilakukan untuk mengajak para pedagang dan pengunjung pasar untuk menggunakan hak pilihnya agar menekan sedikit golput pada pilkada di Sleman 9 Desember 2015 mendatang.

Program aksi Yuni Satia Rahayu salah satunya adalah renovasi 15 pasar tradisional untuk hidupkan perekonomian rakyat Sleman. Di Sleman, menurut Yuni, ada 48 pasar di 17 kecamatan yang ramai pada hari pasaran, seperti Legi, Kliwon, Pon, Pahing, Wage. Pasar Godean misalnya paling rame tiap hari pasaran Pon, sesuai perhitungan kalender Jawa.

Menurut Yuni, menjelang adanya tahapan debat pilkada Sleman yang diadakan pada 21, 28 November dan 5 Desember 2015, masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sleman pasti terus melakukan kampanye. Ketua Gerakan Relawan Sleman, Sohibul Khoiri, SE, menjelaskan upaya sosialisasi pemenangan pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya dilakukan lebih gencar dengan membagikan alat peraga kampanye, seperti flyer, poster, leaflet ke warga. Sementara dari unsur struktur partai, Ketua PAC PDI Perjuangan Godean, Istidiyanto mengatakan sosialisasi dilakukan serentak dengan bagikan alat peraga kampanye yang sudah dicetak oleh KPU Sleman. Pihaknya juga

mengingatkan kepada para kader agar mengajak warga berbondong-bondong datang ke TPS untuk memanfaatkan hak pilihnya.

Setelah mendengarkan keluhan pedagang, pasangan Yuni dan Danang berjanji akan menampung aspirasi pedagang serta akan mengusung permasalahan tersebut untuk diperjuangkan. Hal ini lantaran kebijakan pemerintah yang baru nanti semestinya mampu melindungi pedagang di pasar tradisional.⁵² Selain di Pasar Godean Beliau juga mengunjungi pasar tradisional lain yang ada di Kabupaten Sleman.

2. Melakukan Kampanye

Kampanye telah diatur dalam PKPU no. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Wali Kota. Bentuk Kampanye ada 2 yaitu kampanye terbuka dan kampanye tertutup⁵³. Tim calon bupati nomor 1 ini melakukan bentuk kampanye terbuka dan tertutup, antara lain :

a) Gelar kampanye terbuka bertemakan kebudayaan

Calon Bupati Sleman nomor urut 1, Yuni Satia Rahayu, bersama wakilnya Danang Wicaksana Sulistya, memilih melakukan kampanye berbudaya dengan menggelar atraksi kesenian di 17 titik kecamatan di

⁵² <http://suarapemilih.com/yuni-gencar-kampanye-ke-pasar.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2016

⁵³ <http://kpu.selumakab.go.id/app/uploads/sites/50/2015/05/PKPU-Nomor-7-Tahun-2015.pdf> diakses pada 27 Mei 2016

Kabupaten Sleman. Selain menggelar atraksi seni berupa kesenian jathilan, pasangan Yuni-Danang juga menyapa langsung warga yang berada di sekitar lokasi atraksi seni, sekaligus membagikan bunga mawar merah.

“Jangan lupa nanti tanggal 9 Desember 2015, manfaatkan hak konstitusi bapak dan ibu semua, rakyat Sleman coblos nomor 1, kerudung merah,” kata Yuni Satia Rahayu, Minggu (29/11/2015).

Warga di sekitar lokasi kesenian terlihat silih berganti datang menyaksikan pentas seni. Salah satunya terdapat di Sembung, Sendangtirto Berbah Sleman misalnya, Yuni Satia Rahayu memotong tumpeng guna peringatan HUT ke-1 kelompok kesenian tradisional Jathilan Kuda Mandala.

Yuni menyebutkan, kampanye berbudaya ini sekaligus untuk mengangkat potensi seni tradisi yang hingga kini masih bertahan di kabupaten Sleman. Sesuai visi dan misi yang telah dibuat, pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya memiliki komitmen untuk melestarikan kesenian tradisional dengan memberikan kesempatan pentas bagi pelaku seni tradisi agar tampil secara rutin.⁵⁴

b) Kampanye Tertutup

⁵⁴ <http://suarapemudajogja.ukmsite.com/2015/11/30/pilkada-2015-paslon-yuni-danang-pilih-lakukan-kampanye-berbudaya/> diakses pada 20 Mei 2016

Kampanye tertutup ini merupakan kampanye yang dilakukan tertutup maupun di tempat terbuka yang dihadiri oleh masyarakat tertentu dengan jumlah 50-500 orang, yang biasanya tidak disertai oleh konvoi atau iring-iringan massa pendukung. Bentuk kampanye ini dinilai lebih efektif karena pasangan calon bupati nomor urut 1 ini dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bentuk kampanye tertutup Yuni Satia Rahayu adalah sebagai berikut :

- Kampanye Sosial Kemasyarakatan

Kampanye ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor 1 maupun wakilnya dengan turun langsung ke dalam lokasi-lokasi yang melangsungkan kegiatan kemasyarakatan meliputi kegiatan kerja bakti, bakti sosial, acara ketoprak, acara wayangan, acara perlombaan voli, dan acara mreti desa. Hal ini terlihat di saat Dusun Nayan Maguwoharjo mengadakan acara mreti desa pada tanggal 28 Oktober 2015 Bu Yuni Satia datang untuk menyapa dan meminta doa restu pada masyarakat yang meghadiri acara mreti desa tersebut.

- Kampanye Sosialisasi

Kampanye ini merupakan kampanye yang dilakukan di tempat tertentu seperti di gedung ataupun di ruang pertemuan dengan mengundang warga dengan bertujuan untuk mengadakan sosialisasi. Warga yang diundang dari kelompok tani, kelompok ibu-ibu pkk, kelompok pemuda, KWT dan lain-lain. Di dalam pertemuan tersebut pasangan calon nomor 1

memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi untuk memajukan Sleman yang lebih baik. Selanjutnya di sela-sela kampanye penyampaian visi dan misi tersebut tim sukses dan calon Bupati nomor urut 1 ini menyampaikan sosialisasi, jika yang diundang kelompok pemuda, maka sosialisasinya bertemakan pendidikan politik, jika yang diundang kelompok tani dan KWT sosialisasinya adalah tentang pertanian.

Salah satu wujud kampanye sosialisasi ini adalah dalam pertemuan pertanian yang bertempat di Rumah Makan Sego Wiwit, Sleman, para petani ikan Kabupaten Sleman yang tergabung dalam relawan 4S (cerdaS, tangkaS, berkualitasS, ikhlaS) mengadakan ramah tamah dengan calon Bupati Sleman 2015-2020 Yuni Satia Rahayu, Selasa (1/9/2015) petang.

Di dalam diskusi ini para petani ikan mengeluhkan kehidupannya kepada Yuni. Martinus Manulang misalnya, Petani Ikan asal Dusun Ngelo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, ini menyampaikan tentang adanya birokrasi yang sulit dan berbelit-belit di Pemerintah Kabupaten Sleman. “Banyak anggota kami yang mengeluhkan sulitnya mengurus surat-surat, hingga izinnya berbelit-belit” ujar Martinus. Sama dengan Martinus, Mbah Yono, petani ikan asal Ngemplak, Sleman juga mengaku pernah dijanjikan oleh Badan penelitian dan pengembangan (Litbang) akan mendapatkan paket mesin dan bahan baku, namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasikan.

Kemudian, Ketua Relawan 4S Untung Hadikusumo, mengatakan, tingginya harga pakan ikan di Sleman, yang menyebabkan para petani ikan Sleman harus mengambil pakan ikan dari Jawa Timur. “Padahal jika dilihat Sleman itu mampu dalam penyediaan,” ujar Untung.

Dalam tanggapannya Yuni menyampaikan akan mendorong seluruh masyarakat Sleman untuk gemar mengkonsumsi ikan. “Dalam visi misi saya adalah meningkatkan produksi ikan konsumsi sebanyak 50.000 ton per tahun, dengan cara memberi mesin untuk usaha budidaya ikan, memberikan terpal kepada kelompok tani perempuan untuk kolamisasi ikan di pekarangan,” kata Yuni.

c. Mengadakan Pengajian

Pengajian ini diadakan di kediaman Ibu Yuni satia Rahayu yang berada di Dusun Pugeran Maguwoharjo. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2015 dengan mengundang jamaah pengajian yang ada di sekitar kelurahan Maguwoharjo dan kaum nadhliyin di Kabupaten Sleman. Dalam acara pengajian dengan diawali tahlil berjama'ah kemudian diisi mau'idzah hasanah oleh Habib Mahdi Al'Atas Dalam kesempatan ini Ibu Yuni Satia Rahayu meminta doa restu agar dapat lancar mengikuti kampanye sampai dengan Hari dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

3. Media Kampanye Yuni Satia dan Danang Sulistia Wicaksana

Media merupakan sarana komunikasi politik yang digunakan para kontestan politik guna menjembatani kepentingan kontestan politik dan masyarakat. Sebab hal itu maka Calon nomor urut 1 menggunakan media-media yang ada untuk memperkenalkan segala informasi tentang visi-misi, *track record* maupun kegiatan-kegiatan apapun yang mengenai kampanye pada pemilu pada 2015 di Kabupaten Sleman. Adapun media kampanye yang digunakan pasangan Calon Bupati nomor 1 adalah sebagai berikut. :

a. Media Cetak

Media cetak merupakan sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan masyarakat yang disampaikan secara tertulis biasanya disertai gambar yang berbentuk *printing* atau cetakan yang memberi informasi dengan cara dibaca. Media cetak berisikan segala berita maupun info yang di dalam nya terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Dalam mengadakan kampanye ini Yuni Satia Rahayu menggunakan berbagai macam media sosial yaitu :

a) Koran

Di dalam media koran ini selain berisikan berita pasangan Yuni Satia Rahayu dan Danang Sulistia Wicaksana juga dimuat gambar foto pasangan, visi-misi dan disertai pengenalan program kerja yang

direncanakan untuk Sleman lima tahun yang akan datang. Harapannya dengan dimuatnya dalam media koran ini masyarakat luas dapat mengenal beliau. Adapun koran lokal Yogyakarta yang memuat berita kampanye Yuni Satia Rahayu adalah :

- Kedaulatan Rakyat
- Koran Merapi
- Harian Jogja
- Tribun Jogja

b) Printing Kaos

Di setiap kesempatan kampanye seorang kontestan politik biasanya kerap kali membagikan kaos yang didalamnya dicetak nama, gambar, nomer urut pasangan calon dan slogan-slogan yang khas. Begitu pula pasangan calon nomer urut 1 ini terlihat membagikan kaos saat sedang blusukan di pasar tradisional dan di saat kampanye terbuka.

c) Spanduk dan Baliho

Dalam setiap pesta rakyat atau kampanye media yang sering dijumpai adalah pemasangan spanduk maupun baliho. Media ini sangat cocok digunakan karena dapat dipasang di tempat strategis. Yuni Satia Rahayu menggunakan media ini yang memuat kalimat slogan yang khas, yaitu “Untuk Sleman yang lebih baik supaya Sleman *Ora ngene-ngene wae*”.

Spanduk dan baliho pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Sulistia Wicaksana terlihat terpasang di area jalan protokol di Kabupaten Sleman sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana visi dan misi pasangan calon Bupati Sleman ini.

d) Stiker dan pin

Stiker dan pin ini salah satu media yang sangat praktis yang dapat digunakan kontestan politik untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat, karena stiker dan pin ini dapat ditempel dimana saja, sehingga masyarakat dapat melihat kandidat kontestan politik tersebut. Hal ini dilakukan Yuni Satia Rahayu saat blusukan di pasar Godean Sleman, beliau ijin menempelkan di los beberapa pedagang, sembari bercengkrama dengan pedagang tersebut.

b. Media elektronik

Media elektronik merupakan media penyampaian informasi secara elektronik yang berupa rekaman video, rekaman audio serta presentasi multimedia. Media elektronik dapat dinikmati dengan cara melihat serta mendengar berbagai bentuk informasi, berita, iklan, siaran, wawancara dan lain sebagainya. Dalam kampanye pilkada tahun 2015 ini, Yuni Satia Rahayu menggunakan media elektronik televisi lokal yang ada di Yogyakarta antara lain :

- Jogja TV
- TVRI Jogja

Kampanye yang dilakukan Yuni Satia Rahayu dan Danang Sulistia Wicaksana dalam media televisi lokal Yogyakarta antara lain berupa iklan-iklan, berita, acara talkshow obrolan angkring di TVRI Yogyakarta dan debat calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman yang disiarkan langsung oleh Jogja TV.

c. Media Sosial

Media sosial ataupun sering disebut social media merupakan sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi (sharing), membangun jaringan dan menciptakan suatu tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan melalui media sosial ini bebas, dan dapat mengirimkan pesan pada banyak orang, tidak hanya untuk satu orang saja. Jenis media sosial tersebut ada facebook, instagram, path, twitter, youtube, instant messenger, blog, dan lain-lain.

Dengan berkembangnya media sosial di era globalisasi ini tentu banyak masyarakat menggunakannya. Dengan harapan ketika para calon bupati dan wakil bupati ini menggunakan media sosial sebagai media kampanye dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Karena media sosial sangat mudah dan praktis dan dapat menjangkau kepada masyarakat muda maupun tua. Tim kampanye Yuni Satia Rahayu dan Danang Sulistia juga mengkampanyekan beberapa media sosial yaitu melalui Twitter, Facebook, dan Instagram yang masing-masing username nya adalah Yuni Satia Rahayu.

Dengan memanfaatkan media sosial ini pula tim sukses Yuni Satia Rahayu menyelenggarakan lomba ataupun sayembara fotografi yang ditujukan kepada masyarakat sleman yang bertemakan kebudayaan, tradisi ataupun tentang bentang alam yang ada di Kabupaten Sleman. Hal ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat lebih mengenali, mengeksplorasi, mempromosikan kekayaan alam maupun budaya yang ada di Kabupaten Sleman sekaligus melestarikannya di tengah era golbalisasi saat ini.

BAB IV

ANALISIS PERILAKU POLITIK YUNI SATIA RAHAYU DALAM PILKADA DI KABUPATEN SLEMAN

A. Perilaku Politik Yuni Satia Rahayu dalam Kampanye Pilkada di Kabupaten Sleman

Pembahasan perilaku politik, sama halnya membahas tentang semua tindakan yang berhubungan dengan apapun yang dilakukan oleh elite politik, termasuk strategi politik, komunikasi politik yang diterapkannya. Maka dari itu, perilaku politik dalam kaitannya dengan kampanye politik: merupakan bagaimana cara para aktor politik melakukan gerakan-gerakan serempak berdasarkan nilai-nilai yang dimanifestasikan dalam perbuatan sehari-hari, sehingga mampu untuk melakukan terobosan serta perubahan yang pada akhirnya akan menarik simpatikan dari khalayak masyarakat. Adanya kumpulan-kumpulan kebenaran dan petunjuk yang diterapkan dalam tingkah laku sehari-hari sehingga dalam hal ini, para aktor mampu untuk mencerminkan jiwa kepemimpinannya terhadap kebaikan yang dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan.

Dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak yang terjadwal pada bulan Bulan November hingga awal Desember Yuni menyelenggarakan kampanye terbuka maupun tertutup, adapun perilaku politik Yuni Satia Rahayu dalam kampanye pilkada tersebut diantaranya diantara lain adalah :

a. Peduli dengan pasar tradisional

Semakin pesat dan luasnya perkembangan pasar modern dan jaringan ritel dianggap semakin meminggirkan pasar tradisional atau pasar rakyat. Oleh karenanya itu Yuni Satia Rahayu mengupayakan memberikan perhatian khusus dengan mempertahankan keberadaan dan kelangsungan pasar rakyat, juga turut mengkampanyekan peran pasar rakyat sebagai tulang punggung perekonomian khususnya perekonomian di wilayah Sleman. Ini diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya menggelar diskusi sebagai wadah komunikasi untuk membahas isu pasar rakyat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan pasar rakyat, Ibu Yuni Satia Rahayu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, harus ada kedisiplinan dan ketertiban dari pengunjung dan penjual untuk menjaga kebersihan. Kedua, sebaiknya ada dana yang dialokasikan untuk mendesain atau mengelola pasar. Sementara yang ketiga adalah diperlukan adanya tertib ukur dan penjual diharapkan tidak menjual barang-barang yang melanggar hukum.

. Dari diskusi itu diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang jelas terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat dan permasalahan pasar rakyat dalam rangka pengembangan dan kelangsungannya. Kedua, perlu ada strategi pemerintah dalam pengembangan dan kelangsungan pasar rakyat, serta pihak-pihak yang fokus pada pengembangan pasar rakyat untuk kemitraan.

b. Kampanye Kebudayaan

Di tengah tergerusnya jaman era globalisasi, tim sukses Yuni Satia Rahayu berusaha menghadirkan konsep pagelaran kebudayaan jawa dalam kampanye terbuka yang dilaksanakan di Lapangan Ganjuran Condong Catur. Di dalam kesempatan kampanye tersebut diadakan pagelaran seni jathilan atau sering disebut kuda lumping yang merupakan puncak dari rangkaian perjalanan kampanye di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Yuni menyebutkan pilihan kampanye berbudaya ini sekaligus untuk mengangkat potensi seni tradisi yang hingga kini bertahan. Sesuai visi dan misi yang telah dibuat, Yuni dan tim sukses memiliki komitmen pelestarian kesenian tradisional dengan memberikan kesempatan pentas bagi pelaku seni tradisi agar rutin tampil.

c. Yuni Satia Rahayu saat Debat Pilkada

Yuni Satia Rahayu, cabup yang diusung PDIP dan Gerindra berjanji akan mengadakan anggaran khusus desa Rp 1 – 2 miliar per desa setiap tahun dan Rp 50 juta untuk setiap pedukuhan di Sleman yang berjumlah 1,112 pedukuhan. Totalnya mencapai angka Rp 500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun sarana dan pra sarana untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Yuni juga memiliki rencana untuk membebaskan Nilai Jual Objek Pajak (NJPO) lahan pertanian di Sleman.

Menurut penulis apa yang direncanakan Yuni tersebut tidak realistis. Hal ini dikarenakan bahwa anggaran khusus untuk desa yang

dicanangkan Yuni tersebut jauh lebih besar daripada yang sudah ada di APBD 2015, yaitu Rp 300 miliar. Tidak bijak bila kita menjanjikan hal yang sulit seperti anggaran khusus desa yang mencapai Rp 500 miliar. Bila hal tersebut dipaksakan akan memangkas anggaran untuk program lain dan mengganggu.

B. Tinjauan Etika Politik Islam Terhadap Perilaku Yuni Satia Rahayu

Etika politik Islam relatif tidak sama dengan etika politik umum, etika politik umum melihat perbuatan baik dan buruk manusia berdasar pada aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan etika politik islam memiliki dasar yang sakral dari Wahyu Allah dan Sunnah Rasul. Interpretasi bersifat deduktif dari Nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tersebut menjadi suatu yang niscaya. Demikian pula sebaliknya, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam. Artinya, realitas yang baik dapat diberi justifikasi sebagai sesuatu yang patut dipertahankan jika sesuai dengan spirit nash tersebut, walaupun hasil aktualisasinya tidak memiliki indoktrinasi. Oleh karena itu penerapan dalam konteks penerapan etika politik, hampir seluruh jalur pengambilan keputusan dalam syari'at Islam dapat diberlakukan secara proporsional.⁵⁵

Apabila politik atau *siyasah* itu artinya memelihara urusan ummat maka para pelaku politik Islam hendaknya harus berani merubah paradigma politiknya, bahwa tujuan berpolitik adalah untuk mengatur, mengurus, dan

⁵⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2012), hlm.22.

memelihara umat yang semuanya bermuara pada tujuan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk semata-mata mencari jabatan, uang dan kekuasaan.

Oleh karena itu, etika politik dalam kaitannya dengan kampanye politik adalah bagaimana para aktor politik melakukan gerakan-gerakan serempak berdasarkan nilai-nilai yang dimanifestasikan dalam perbuatan sehari-hari sehingga mampu untuk melakukan terobosan-terobosan serta perubahan yang pada akhirnya akan menarik simpatisan dari khalayak masyarakat.

Melalui simbol dan nilai-nilai Islam, politikus meyakinkan sebanyak mungkin masyarakat agar menerima pandangannya, sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan masyarakat melalui wicara persuasi, bukan manipulasi, pengkhianatan dan kekerasan.⁵⁶

Terkait dengan perilaku politik yang dilakukan oleh Ibu Yuni Satia Rahayu yang diantaranya adalah melakukan kegiatan kampanye politik dengan bersilaturahmi serta meminta doa restu kepada ulama Nadhlatul Ulama khususnya yang ada di Kabupaten Sleman, penguatan jaringan ini dalam organisasi islam ini, serta memainkan opini-opini masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa. Melalui silaturahmi dengan ulama ini akan semakin mempererat hubungan dengan ulama sehingga apabila Yuni Satia Rahayu

⁵⁶ Mohammad Zakaria al-Naddaf, *Akhlaaqus siyaasati Li al-Daulah al-Islamiyah Fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Pustaka Azzam : Jakarta.2001) hlm. 87

terpilih diharapkan dapat berpihak kepada organisasi islam. Terlepas dari janji-janji politik yang mungkin bersifat untuk keuntungan individu.

Silaturahmi dalam Islam merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini juga terdapat pada pendapat Al-Ghazali mengenai etika politik yaitu Mendekatkan diri dengan Ulama serta ada rasa rindu untuk selalu melihat dan berkumpul dengan Ulama, hal ini bisa dilakukan dengan duduk berbaur dengan rakyat di majelis-majelis mereka, sehingga mereka akan selalu mendengarkan nasehat-nasehat para Ulama.. Yang seharusnya adalah para pemimpinlah yang tunduk dan patuh kepada Ulama, karena Ulama adalah penerang bagi hati para pemimpin dan penunjuk bagi jalan yang benar.

Dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) ⁵⁷

Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memelihara silaturahmi dan jangan pernah memutuskannya. Karena dengan silaturahmi hubungan antara manusia akan semakin sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Pentingnya silaturahmi juga dapat dilihat dari hadits yang berikut:

⁵⁷ QS. An-Nisa (4) :1

الرَّحْمَ مَعْلَقَةً بِالْعَرَشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ⁵⁸

Hadits di atas menjelaskan betapa Allah SWT akan memberikan kebaikan kepada seseorang yang menyambungkan tali silaturahmi dan Allah SWT juga tidak segan-segan untuk memutuskan kebaikan kepada seseorang yang memutuskan silaturahmi.

Selain mempererat hubungan dengan ulama-ulama Nadhlatul Ulama, Yuni Satia Rahayu juga berusaha menjalin silaturahmi kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat dalam acara pengajian akbar, mengunjungi pedagang pasar tradisional, menyambangi masyarakat dalam acara ataupun kegiatan sosial seperti acara merti dusun, kerja bakti dan lain-lain. Pada saat kampanye terbuka yang diadakan tim sukses Yuni Satia Rahayu dipusatkan di Lapangan Ganjuran ini bertujuan agar tidak mengganggu jalanan umum. Di kesempatan itu pula Yuni Satia Rahayu memproklamirkan kampanye damai dengan cara menyuguhkan kampanye bertemakan kebudayaan jawa yaitu kesenian jathilan. Sehingga kampanye tersebut tidak mendatangkan *mudharat*.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat dipahami bahwa selama kampanye perilaku kampanye perilaku politik yang dilakukan oleh Yuni Satia Rahayu dan tim suksesnya dinilai tidak mendatangkan *mudharat* terhadap

⁵⁸ Ali Ahmad, *Kitab shahih Al Bukhari dan Muslim*, (Depok:Alita Aksara Media,2012) hlm. 43

masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam etika politik Islam, seperti nilai-nilai silaturahmi, pendekatan kepada masyarakat, nilai pendidikan kepada masyarakat, baik dalam wujud penyuluhan, pelatihan maupun bentuk sosialisasi yang lainnya.

Selain itu untuk menanamkan kesan yang baik di benak masyarakat Yuni Satia Rahayu beserta tim suksesnya menggunakan media masa baik cetak berupa pemasangan baliho, pembagian pin, kaos sticker, serta dalam media elektronik berupa kampanye di stasiun televisi dan radio untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan visi dan misi Yuni tersebut.

Lebih dari itu Yuni Satia Rahayu juga Yuni Satia Rahayu mengajak masyarakat Kabupaten Sleman khususnya untuk mengenali, mengeksplorasi serta mempertahankan kelestarian bentang alam dan bentang budaya yang ada di Sleman dengan tajuk sayembara foto.

Akan tetapi terlepas dari semua ini ada juga dari perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku politik islam, seperti janji-janji politik yang mungkin diberikan kepada masyarakat melalui para tim sukses apabila Yuni Satia Rahayu terpilih dan tercermin saat debat politik cabup dan cawabup menjelang pilkada , hal ini dikarenakan pada saat debat Yuni satia Rahayu dan Danang Sulistiya Wicaksana memberikan statement tentang anggaran desa yang menurut pandangan khalayak tidak realistis dan terkesan terlalu dipaksakan, sehingga ini bertentangan dengan nilai etika politik islam, yang

seharusnya calon pemimpin memberikan argumen yang realistis agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin tersebut.

Terkait dengan janji politik yang tidak realistis, Al Baghowi mengatakan bahwa makna dari “mereka memelihara janji-janjinya” adalah memelihara apa-apa yang diamanahkan kepada mereka serta menunaikan janji-janji yang diutarakannya kepada manusia. Sementara itu Imam Asy Syaukani mengatakan bahwa amanah adalah apa yang diamanahkan kepada mereka sedangkan janji (‘ahd) adalah apa yang telah dijanjikan antara dirinya dengan Allah SWT. atau antara sesama manusia.

Sedangkan pelanggaran janji ini bisa disebut dengan ikhlaf (pengingkaran) atau kadzib (dusta). Ikhlaf berarti ‘admul wafaa bil ‘ahdi (tidak memenuhi janji). Sedangkan kadzib, diantara fuqaha ada yang menyamakannya dengan ikhlaf namun dari mereka ada yang memisahkan diantara keduanya, yaitu kadzib (dusta) adalah terhadap sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu dan saat ini sedangkan ikhlaful wa’d (mengingkari janji) adalah untuk sesuatu yang berkaitan dengan masa datang.

Adapun hukum dari menyalahi ‘ahd atau wa’d menurut mereka yang membedakan antara keduanya ‘ahd adalah terhadap apa yang diwajibkan atau diharamkan Allah sedangkan wa’d adalah selainnya maka menyalahi ‘ahd adalah haram sedangkan hukum menyalahi wa’d maka Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah berspakat apabila seseorang telah berjanji (wa’d) tentang sesuatu yang tidak diharamkan maka seharusnya dia menepati

janjinya itu. Demikianlah, namun barangsiapa yang berjanji sementara itu dia berniat untuk mengingkarinya maka sudah dipastikan bahwa orang itu berdosa dan didalam dirinya terdapat cabang dari kemunafikan.⁵⁹

Dari seluruh perilaku Yuni Satia Rahayu yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, menurut perspektif etika politik islam perilaku yang dilakukan oleh Yuni Satia Rahayu dalam kampanye pemilihan kepala daerah kabupaten Sleman ada yang memenuhi kriteria ketentuan etika politik islam yaitu mendekatkan diri kepada ulama, menjaga silaturahmi kepada masyarakat, adil tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain dan ada yang kurang sesuai dengan etika politik islam yaitu janji politiknya yang tidak realistis dengan kenyataan (berdasarkan APBD Kabupaten Sleman).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁹ Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.) hlm 52